

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Wow, Dana Operasional Wagub DKI Rp26 Miliar

JAKARTA (Pos Kota) – Jabatan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta memang menggiurkan. Selain kekuasaan, dengan menduduki kursi DKI-2 pundi-pundi uang puluhan miliar bisa diperoleh setiap tahunnya.

Jangan heran, siapapun politisi pasti ngiler menjadi orang nomor dua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Luar Negeri DKI Jakarta, M. Mawardi menerangkan, pendapatan gubernur dan wakil gubernur berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan diatur Kepres Nomor 66 tahun 2001.

Selain itu, gubernur dan wakil gubernur juga memperoleh tunjangan lain berupa dana operasional. Tunjangan operasional ini diatur PP Nomor 109 tahun 2000.

Berdasar Kepres, Gubernur DKI Jakarta menerima gaji pokok sebesar Rp3,2 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp5,4 juta/bulan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta memperoleh gaji pokok Rp2,6 juta/bulan dan tunjangan jabatan Rp4,3 juta/bulan.

Sementara itu, berdasar PP Nomor 109 tahun 2000, gubernur dan wakil gubernur memperoleh Biaya Penunjang Operasional (BOP) berdasar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni paling tinggi sebesar 0,15 persen setahun.

Artinya, bila tahun ini PAD Jakarta mencapai target sebesar Rp 51 triliun seperti tertuis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, gubernur dan wakil gubernur berhak atas BPO sebesar Rp 3,15 miliar (60 persen) setiap bulan.

Sementara Wakil Gubernur dapat Rp 2,21 miliar/bulan (40 persen) atau sekitar Rp26,52 miliar setahun. Bila ditambah gaji menjadi sekitar Rp27 miliar lebih setahun.

## KOORDINASI

“BOP itu digunakan gubernur dan wakil gubernur untuk koordinasi dengan institusi lain, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan lainnya,” jelas Mawardi, Kamis (13/2).

Meski dalam aturan BOP ditetapkan tertinggi 0,15 persen dari PAD, namun Gubernur Anies Baswedan saat masih memiliki wakil gubernur hanya menganggarkan 0,13 persen. Sedangkan saat wakil gubernur kosong diputuskan 10 persen. Adapun fasilitas lain yang diperoleh wakil gubernur adalah mobil Dinas Toyota Land Cruiser dan rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui saat ini kursi DKI-2 tengah diperebutkan dua politisi, yakni A Riza Patria dan Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berbagai upaya dilakukan keduanya agar terpilih menjadi pendamping Gubernur Anies Baswedan. Lobi-lobi politik dengan menggelar safari ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dilakukan keduanya.

(john/ruh/st)